SALINAN

BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

KODE KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Menimbang :

a. bahwa pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu perlu dibentuk Pedoman guna mendukung implementasi informasi kearsipan dinamis terintegrasi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Kalisifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten PringsewuT ahun 2020 nomor 114);

7. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksana Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 506);

8. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pringsewu/Penjabat Bupati Pringsewu.

4. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dantanggungjawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol tautan dan pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas Arsip.

7. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.

8. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini tujuan untuk:

a. sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis;

b. mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya untuk sinkronisasi informasi kearsipan antara Kementerian dan Pemerintah Daerah dalam implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;

c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi kegiatan Pemerintah Daerah; dan

d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip.

BAB III
KETENTUAN KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 3

(1) Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi:

a. fungsi fasilitatif; dan

b. fungsi substantif.

(3) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di unit kerja di lingkungan perangkat daerah.

(4) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

(5) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka.

(6) Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip.

(7) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1) Penggunaan kode klasifikasi arsip pada penomoran naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan menggunakan angka arab.

(2) Penomoran naskah dinas penugasan menggunakan angka arab dengan memuat unsur paling sedikit berupa:

a. kode klasifikasi;

b. nomor; dan

c. tahun terbit.

(3) Penomoran naskah dinas korespondensi internal menggunakan angka arab dengan memuat unsur paling sedikit berupa:

a. kode kalsifikasi;

b. nomor; dan

c. tahun terbit.

(4) Penomoran naskah dinas korespondensi eksternal menggunakan angka arab dengan memuat unsur paling sedikit berupa:

a. kategori klasifikasi keamanan akses arsip;

b. kode klasifikasi;

c. nomor; dan

d. tahun terbit.

(5) Penomoran naskah dinas khusus menggunakan angka arab paling sedikit memuat :

a. nomor urut; dan

b. tahun terbit.

(6) Ketentuan mengenai contoh penomoran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 506), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 27 November 2024

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

MARINDO KURNIAWAN

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 27 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024 NOMOR 709

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PUTRA ADITIA GUMILANG

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 23 TAHUN 2024
TENTANG : KODE KLASIFIKASI ARSIP

A. KODE KLASIFIKASI

000	UMUM		
	000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN	
		000.1.1	Telekomunikasi
		000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri
			000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
			000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD
			000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai
		000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri
			000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah
			000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD
			000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai
		000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor, antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya
		000.1.5	Rapat pimpinan
		000.1.6	Penyediaan Konsumsi
		000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas
			000.1.7.1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas
			000.1.7.2 Pemeliharaan dan perbaikan
			000.1.7.3 Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan
		000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor
			000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape
			000.1.8.2 Penghijauan
			000.1.8.3 Perbaikan Gedung
			000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor
			000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma
			000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman
		000.1.9	Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
			000.1.9.1 Perbaikan / Pemeliharaan
			000.1.9.2 Pemasangan

000.1.10 Ketertiban dan Keamanan

000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas

000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan

000.1.11 Administrasi Pengelolaan Parkir

000.1.12 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya

000.2 PERLENGKAPAN

000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan

000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan

000.2.1.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan

000.2.2 Pemeliharaan Peralatan kantor

000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor

000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor

000.2.3 Distribusi

000.2.3.1 Barang habis pakai

000.2.3.2 Barang milik daerah

000.2.4 Penghapusan Barang Milik Daerah, antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan

000.2.5 Pengelolaan Database Barang Milik Daerah

000.3 PENGADAAN

000.3.1 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

000.3.2 Pengadaan Langsung, antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak

000.3.3 Pengadaan Tidak Langsung/Lelang, antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak

000.3.4 Swakelola, antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

000.3.5 Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan, antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa

000.3.6 Monitoring dan Evaluasi, antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi

000.4 PERPUSTAKAAN

000.4.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

000.4.2 Deposit Bahan Pustaka

000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman

000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional

000.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog

000.4.3 Koleksi Pustaka

000.4.3.1 Pembelian

000.4.3.2 Hibah

000.4.3.3 Hadiah

000.4.3.4 Tukar Menukar

000.4.3.5 Implementasi Undang-Undang KCKR

000.4.3.6 Terbitan Internal

000.4.3.7 Pendistribusian bahan pustaka surplus

000.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk)

000.4.4 Pengolahan Bahan Pustaka

000.4.5 Pangkalan Data Katalog Koleksi

000.4.6 Layanan Perpustakaan

000.4.6.1 Keanggotaan

000.4.6.2 Peminjaman

000.4.6.3 Pengembangan gemar baca

000.4.7 Kerjasama Perpustakaan
- 000.4.7.1 MoU
- 000.4.7.2 Perjanjian kerjasama
- 000.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional

000.4.8 Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
- 000.4.8.1 Pengembangan situs web
- 000.4.8.2 Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
- 000.4.8.3 Pengembangan program aplikasi perpustakaan
- 000.4.8.4 Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital

000.4.9 Pangkalan Data Layanan Perpustakaan

000.4.10 Konservasi
- 000.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan
- 000.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan
- 000.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan

000.4.11 Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)

000.4.12 Transformasi Digital

000.4.13 Kurasi Digital

000.4.14 Pengembangan Perpustakaan
- 000.4.14.1 Perpustakaan Umum
- 000.4.14.2 Perpustakaan Khusus
- 000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah
- 000.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi

000.5 KEARSIPAN

000.5.1 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

000.5.2 Pembinaan Kearsipan
- 000.5.2.1 Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
- 000.5.2.2 Bimbingan Konsultasi Arsiparis
- 000.5.2.3 Penilaian Arsiparis

	000.5.2.4	Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
	000.5.2.5	Data Base Arsiparis
	000.5.2.6	Bimbingan Konsultasi Kearsipan
	000.5.2.7	Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
	000.5.2.8	Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
	000.5.2.9	Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan
	000.5.2.10	Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)
	000.5.2.11	Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
000.5.3	Pengelolaan Arsip Dinamis	
	000.5.3.1	Penciptaan, antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi
	000.5.3.2	Pemberkasan Arsip Aktif, antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas
	000.5.3.3	Penataan Arsip Inaktif, antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik
	000.5.3.4	Penggunaan, antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem

Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip

000.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis

000.5.4 Program Arsip Vital, antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital

000.5.5 Pengelolaan Arsip Terjaga, antara lain: Daftar Identifkasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga

000.5.6 Penyusutan Arsip

000.5.6.1 Pemindahan Arsip, antara lain:Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan

000.5.6.2 Pemusnahan Arsip, meliputi: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusanahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan

000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis, meliputi: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan

000.5.7 Alih Media Arsip, antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang Dialihmediakan

000.5.8 Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis

000.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif

000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif

000.5.9 Pengelolaan Arsip Statis

000.5.9.1 Akuisisi, meliputi: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip , Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan

000.5.9.2 Penghargaan dan Imbalan

000.5.9.3 Sejarah Lisan, antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkip

000.5.9.4 Daftar Pencarian Arsip Statis, antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis

000.5.9.5 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik, antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide

000.5.9.6	Preservasi Preventif, antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
000.5.9.7	Preservasi Kuratif
000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis
000.5.9.9	Akses Arsip Statis, antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber
000.5.10	Jasa Kearsipan, antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip
000.5.11	Pengelolaan SIKN dan JIKN
000.5.12	Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
000.5.13	Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
000.5.14	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
000.5.15	Pengawasan Kearsipan
000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal
000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal
000.5.15.3	Sanksi

000.6	PERSANDIAN	
000.6.1	Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
000.6.2	Pengamanan persandian	
000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto	
000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto	
000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan	
000.6.3	Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi	
000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian	
000.6.3.2	Administrasi Pengkajian	
000.6.3.3	Pelaksanaan	

	000.6.3.4	Pelaporan
000.6.4	Pembinaan dan Pengendalian Persandian	
	000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)
	000.6.4.2	Jaring Komunikasi
000.6.5	Layanan Sertifikasi Elektronik	
	000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi
	000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi
	000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
	000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing
	000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
	000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
	000.6.5.7	Pelaporan
000.7	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	
000.7.1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang	
	000.7.1.1	Musrenbang Provinsi
	000.7.1.2	Musrenbang Nasional
	000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota
	000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan
	000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan
	000.7.1.6	Musrenbang Desa
000.7.2	Perencanaan Pembangungan Daerah	
	000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
	000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
	000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah
	000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan
	000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
	000.7.2.6	Program kerja tahunan
	000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja
	000.7.2.8	Laporan Berkala
	000.7.2.9	Laporan Insidential
	000.7.2.10	Evaluasi Program
000.7.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	

000.7.4 Konsultasi Perencanaan Pembangunan

000.7.5 Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

000.7.6 Aksi Strategis Daerah

- 000.7.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
- 000.7.6.2 Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
- 000.7.6.3 Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
- 000.7.6.4 Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
- 000.7.6.5 Penerapan perencaan aksi strategi daerah

000.7.7 Perencanaan Pendanaan Pembangunan

- 000.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah
- 000.7.7.2 Pendanaan Daerah
- 000.7.7.3 Kerjasama Pembangunan Nasional
- 000.7.7.4 Surat Berharga Syariah Negara
- 000.7.7.5 Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru

000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

000.8.1 Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- 000.8.1.1 Pembentukan
- 000.8.1.2 Pengubahan
- 000.8.1.3 Pembubaran

000.8.2 Uraian Jabatan dan Tata Kerja

- 000.8.2.1 Analisa Jabatan
- 000.8.2.2 Analisa Beban Kerja

000.8.3 Ketatalaksanaan

- 000.8.3.1 Proses Bisnis
- 000.8.3.2 Standar Pelayanan
- 000.8.3.3 Standar Operasional Prosedur
- 000.8.3.4 Pelayanan Publik

000.8.4 Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional

000.8.5 Evaluasi Kelembagaan

000.8.6 Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi

000.8.6.1 Budaya Kerja

000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN

000.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah

000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi

000.9.3 Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan

000.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan

000.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

000.9.6 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

000.9.6.1 Data

000.9.6.2 Statistik

000.9.6.3 Jurnal Hasil Penelitian/ Pengkajian

000.9.7 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

000.9.8 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

000.9.9 Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

000.9.10 Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop

100 PEMERINTAHAN

100.1 OTONOMI DAERAH

100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)

100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah

100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD

100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan

100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)

100.1.4.5 Assosiasi Daerah

100.1.5 Otonomi khusus dan daerah istimewa

100.1.6 Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)

100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah

100.1.7 LKPJ/ LKPJ AMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)

100.2 PEMERINTAHAN UMUM

100.2.1 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerjasama

100.2.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

100.2.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah

		100.2.2.3	Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
		100.2.2.4	Fasilitasi Kecamatan
		100.2.2.5	Fasilitasi Pelayanan Umum
	100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan	
		100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah
		100.2.3.2	Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara
		100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah
		100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan
		100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah
100.3	HUKUM		
	100.3.1	Program Legislasi	
		100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah
		100.3.1.2	Program Legislasi
	100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	
	100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah	
		100.3.3.1	Keputusan/Ketetapan Gubernur
		100.3.3.2	Keputusan/Ketetapan Bupati
		100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota
		100.3.3.4	Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
		100.3.3.5	Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten
		100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota
	100.3.4	Instruksi/Surat Edaran	

	100.3.4.1	Instruksi/Surat Edaran Provinsi
	100.3.4.2	Instruksi/Surat Edaran Kabupaten
	100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota
	100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II
100.3.5	Surat Perintah	
	100.3.5.1	Surat Perintah Gubernur
	100.3.5.2	Surat Perintah Bupati
	100.3.5.3	Surat Perintah Walikota
	100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II
100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	
100.3.7	Nota Kesepakatan/ Memorandum of Understanding (MoU)/ Kontrak/ Perjanjian Kerja Sama	
	100.3.7.1	Dalam Negeri
	100.3.7.2	Luar Negeri
100.3.8	Dokumentasi Hukum, antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi	
100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	
100.3.10	Bantuan/ Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	
100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum	
	100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran
	100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata
	100.3.11.3	Tata Usaha Negara
	100.3.11.4	Perburuhan
	100.3.11.5	Arbitrase
	100.3.11.6	Sengketa Adat
100.3.12	Perijinan	
100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
	100.3.13.1	Hak Cipta
	100.3.13.2	Hak Paten
	100.3.13.3	Hak Desain Industri
	100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang

100.3.13.5 Hak Merk

100.3.14 Permohonan HaKI yang ditolak

200 POLITIK

200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara

200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan

200.1.2.3 Bela Negara

200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan

200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan

200.1.3 Kewaspadaan Nasional

200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan

200.1.3.2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan

200.1.3.3 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan

200.1.3.4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial

200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing

200.1.4 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan

200.1.4.1 Ketahanan Seni

200.1.4.2 Ketahanan Budaya

200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan

200.1.4.4 Organisasi Kemasyarakatan

200.1.4.5 Masalah Sosial Kemasyarakatan

200.1.4.6 Fasilitasi

200.1.4.7 Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat

	200.1.4.8	Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
	200.1.4.9	Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
	200.1.4.10	Fasilitasi Sengketa Ormas
	200.1.4.11	Fasilitasi Ormas
200.1.5	Politik Dalam Negeri	
	200.1.5.1	Implementasi Kebijakan Politik
	200.1.5.2	Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
	200.1.5.3	Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
	200.1.5.4	Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
	200.1.5.5	Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
	200.1.5.6	Pemerintah Daerah
	200.1.5.7	Database Parpol
	200.1.5.8	Pendidikan Budaya Politik
	200.1.5.9	Pemilihan Umum
200.1.6	Ketahanan Ekonomi	
	200.1.6.1	Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
	200.1.6.2	Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
	200.1.6.3	Perilaku Perekonomian Masyarakat
	200.1.6.4	Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi
200.2	PEMILU	
	200.2.1	Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	200.2.2	Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
	200.2.2.1	Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
	200.2.2.2	Daftar Pemilih Sementara (DPS)
	200.2.2.3	Daftar Pemilih Tambahan
	200.2.2.4	Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)

	200.2.2.5	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
200.2.3	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	
	200.2.3.1	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
	200.2.3.2	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
	200.2.3.3	Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
	200.2.3.4	Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual
200.2.4	Penetapan Peserta Pemilu	
	200.2.4.1	Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
	200.2.4.2	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
	200.2.4.3	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
	200.2.4.4	Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
	200.2.4.5	Peta Daerah Pemilihan
200.2.5	Pencalonan Pemilu	
	200.2.5.1	Petunjuk teknis pencalonan
	200.2.5.2	Surat pencalonan pendaftaran
	200.2.5.3	Daftar bakal calon
	200.2.5.4	Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
	200.2.5.5	Dokumen verifikasi administrasi
	200.2.5.6	Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
200.2.6	Kampanye Pemilu	
	200.2.6.1	Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye

200.2.6.2 Nama juru kampanye/ pelaksana kampanye

200.2.6.3 Peringatan tertulis/ penghentian kegiatan kampanye

200.2.7 Dana Kampanye

200.2.7.1 Pedoman audit dana kampanye

200.2.7.2 Laporan dana kampanye peserta Pemilu

200.2.7.3 Laporan hasil audit dana kampanye

200.2.8 Pemungutan dan Penghitungan Suara

200.2.8.1 Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara

200.2.8.2 Master surat suara

200.2.8.3 Surat suara yang terpakai

200.2.8.4 Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)

200.2.8.5 Formulir pemilu di Pemerintah Daerah

200.2.9 Penetapan Hasil Pemilu

200.2.10 Perselisihan Hasil Pemilu

200.2.10.1 Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu

200.2.10.2 Jawaban dan kesimpulan termohon

200.2.10.3 Salinan Putusan lembaga peradilan

200.2.11 Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah

300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja

300.1.2.1 Tata Operasiona Polisi Pamong Praja

300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja

300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja

300.1.4 Perlindungan Masyarakat

300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil

300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN

300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan

300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan

300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring

300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan

300.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan

300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan

300.2.2.6 Registrasi BEACON

300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan

300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan

300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan

300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan

300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan

300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan

300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)

300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan

300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan

300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi

300.2.8 Operasi Komunikasi

300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)

300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)

300.2.8.3 Registrasi BEACON

300.2.9 Inventarisasi dan Pemeliharaan

300.2.10 Pengembangan Sistem Informasi

300.2.11 Penyajian dan Layanan Informasi

300.2.12 Pelapooran dan Evaluasi

300.2.12.1 Laporan Harian

300.2.12.2 Laporan Bulanan

300.2.12.3 Laporoan Tahunan

300.2.12.4 Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.1.2 Pembangunan Sumber Daya

400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan Ketrampilan Pengembangan Sumber Daya

400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya

400.1.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya

400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup

400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan Inovasi

400.1.2.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya

400.1.2.7 Pemantauan dan Evaluasi

400.1.3 Peningkatan Infrastruktur

400.1.3.1 Fasilitasi Transportasi Peningkatan Infrastruktur

400.1.3.2 Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam Peningkatan Infrastruktur

400.1.3.3 Fasilitasi Sosial dalam Peningkatan Infrastruktur

	400.1.3.4	Fasilitasi Ekonomi dalam Peningkatan Infrastruktur
	400.1.3.5	Fasilitasi energi dalam Peningkatan Infrastruktur
	400.1.3.6	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Infrastruktur
	400.1.3.7	Pemantauan dan Evaluasi
400.1.4	Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha	
	400.1.4.1	Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.2	Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.3	Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
	400.1.4.4	Fasilitasi Kemitraan usaha
	400.1.4.5	Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
	400.1.4.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
	400.1.4.7	Pemantauan dan evaluasi
	400.1.4.8	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.9	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
	400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
	400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
	400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
	400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
400.1.5	Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya	
	400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
	400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat

400.1.5.3 Pemberdayaan masyarakat

400.1.5.4 Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya

400.1.5.5 Ketenagakerjaan

400.1.5.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya

400.1.5.7 Pemantauan dan evaluasi

400.1.6 Pengembangan Daerah Khusus

400.1.6.1 Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan

400.1.6.2 Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana

400.1.6.3 Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan

400.1.6.4 Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar

400.1.6.5 Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis

400.1.6.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus

400.1.6.7 Pemantauan dan evaluasi

400.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

400.2.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum

400.2.2.1 Data gender

400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi

400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)

400.2.3.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan

400.2.3.2 Data perlindungan perempuan

400.2.3.3 Advokasi dan fasilitasi

400.2.3.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan

400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender

400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender

400.2.3.7 Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu

400.2.4 Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)

400.2.4.1 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

400.2.4.2 Data perlindungan anak

400.2.4.3 Advokasi dan fasilitasi

400.2.4.4 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak

400.2.4.5 Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak

400.2.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)

400.2.5.1 Pemenuhan Hak Anak

400.2.5.2 Data Klaster Hak Anak

400.2.5.3 Data tumbuh kembang anak

400.2.5.4 Advokasi dan fasilitasi

400.2.5.5 Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak

400.2.5.6 Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak

400.2.6 Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)

400.2.7 Penghargaan Kabupaten Layak Anak

400.2.8 Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak

400.3 PENDIDIKAN

400.3.1 Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.3.2 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal

400.3.2.1 Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)

400.3.2.2 Pelatihan Sosial

400.3.2.3 Peringatan Hari anak

400.3.2.4 Block Grant

400.3.3 Pendidikan Masyarakat

400.3.3.1 Penyelenggaraan Program

	400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial
	400.3.3.3	Pembinaan Program
	400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan
	400.3.3.5	Pameran
	400.3.3.6	Rakor
	400.3.3.7	Sosialisasi
	400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi
400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama	
	400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar
	400.3.5.2	Block Grant
	400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,
	400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan
	400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)
	400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin
400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus	
	400.3.6.1	Kurikulum, Bahan Ajar, Alat Bantu Pembelajaran
	400.3.6.2	Block Grant
	400.3.6.3	Lomba, Festival
	400.3.6.4	Sosialisasi, Bimtek
	400.3.6.5	Pendataan
	400.3.6.6	Kelembagaan
400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan
	400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.7.3	Sertifikasi Guru
	400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
	400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
	400.3.7.7	Block Grant
400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
	400.3.8.1	Kurikulum
	400.3.8.2	Bahan Ajar
	400.3.8.3	Pelatihan
	400.3.8.4	Block grant
	400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi

	400.3.8.6	Lomba , Sayembara, festival
	400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
	400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	
	400.3.9.1	Bahan ajar
	400.3.9.2	Petunjuk Teknis
	400.3.9.3	Block grant
	400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
	400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
	400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
	400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
	400.3.9.8	Pendataan
	400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi
400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik	
	400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
	400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
	400.3.10.3	Setifikasi Guru
	400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
	400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
	400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
	400.3.10.7	Block grant
	400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
400.3.11	Penilaian Pendidikan	
	400.3.11.1	Penilaian Akademik
	400.3.11.2	Penilaian Non Akademik
	400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan	
	400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
	400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan	
	400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
	400.3.13.2	Sarana Pendidikan
	400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi

400.4 KEOLAHRAGAAN

400.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan

- 400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
- 400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi
- 400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal

400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi

- 400.4.3.1 Olahraga Massal
- 400.4.3.2 Olahraga Tradisional
- 400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata

400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga

- 400.4.4.1 Olahraga Pendidikan
- 400.4.4.2 Olahraga Rekreasi
- 400.4.4.3 Olahraga Prestasi
- 400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga

400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus

- 400.4.5.1 Olahraga Tradisional
- 400.4.5.2 Layanan Khusus

400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga

- 400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan
- 400.4.6.2 Penghargaan Olahraga

400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga

- 400.4.7.1 Pembibitan Olahraga
- 400.4.7.2 Kompetisi
- 400.4.7.3 IPTEK Olahraga

400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan

- 400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan
- 400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan

400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga

- 400.4.9.1 Industri Olahraga
- 400.4.9.2 Promosi Olahraga

400.4.10 Olahraga Prestasi

- 400.4.10.1 Daerah
- 400.4.10.2 Nasional
- 400.4.10.3 Internasional

400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga

- 400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan
- 400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan

400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga

400.5 KEPEMUDAAN

400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.5.2 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda

400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan)

400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)

400.5.2.3 Pengembangan

400.5.3 Peningkatan Wawasan Pemuda

400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan

400.5.3.2 Wawasan Lingkungan

400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum

400.5.4 Peningkatan Kapasitas Pemuda

400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa

400.5.4.2 Kapasitas IPTEK

400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK

400.5.5 Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)

400.5.5.1 Pengkajian

400.5.5.2 Pengembangan

400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi)

400.5.6 Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda

400.5.6.1 Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan

400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan

400.5.7 Kewirausahaan

400.5.7.1 Kelembagaan

400.5.7.2 Pengaderan

400.5.7.3 Perintisan

400.5.8 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan

400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya

400.5.8.2 Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan :

		Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
	400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
400.5.9	Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda	
	400.5.9.1	Standardisasi
	400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda
400.5.10	Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	
	400.5.10.1	Kemitraan
	400.5.10.2	Penghargaan Pemuda
400.6	KEBUDAYAAN	
400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman	
	400.6.2.1	Registrasi Nasional
	400.6.2.2	Pelindungan
	400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan
	400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi
400.6.3	Pembinaan Kesenian dan Perfilman	
	400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan
	400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa
	400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
	400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi
400.6.4	Sejarah dan Nilai Budaya	
	400.6.4.1	Sejarah
	400.6.4.2	Pemetaan nilai
	400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai
	400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi
	400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
	400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah
400.6.5	Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya	
	400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya
	400.6.5.2	Kekayaan budaya

400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia

400.6.5.4 Diplomasi budaya

400.7 KESEHATAN

400.7.1 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.7.2 Upaya Kesehatan Dasar

400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga

400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer

400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan primer

400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas

400.7.2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit

400.7.2.6 ICD 10, Destistry & Stomatology

400.7.2.7 Infeksi menular lewat transfusi darah

400.7.2.8 Penyakit mulut di tingkat primer

400.7.2.9 Pembiayaan darah

400.7.2.10 Penggunaan darah rasional

400.7.2.11 Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah

400.7.2.12 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan

400.7.2.13 Akreditasi puskesmas

400.7.2.14 Puskesmas berprestasi

400.7.3 Upaya Kesehatan Rujukan

400.7.3.1 Pelayanan kesehatan rujukan

400.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)

400.7.3.3 Pelayanan rumah sakit privat

400.7.3.4 Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya

	400.7.3.5	Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
	400.7.3.6	Pelayanan pasien jaminan kesehatan
	400.7.3.7	Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
	400.7.3.8	Badan pengawas rumah sakit
	400.7.3.9	Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
	400.7.3.10	Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
400.7.4	Keperawatan dan keteknisian medik	
	400.7.4.1	Pelayanan Keperawatan Dasar
	400.7.4.2	Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
	400.7.4.3	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
	400.7.4.4	Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
	400.7.4.5	Bina pelayanan kebidanan
400.7.5	Penunjang medik dan sarana kesehatan	
	400.7.5.1	Mikrobiologi dan imunologi
	400.7.5.2	Patologi dan toksilogi
	400.7.5.3	Radiologi
	400.7.5.4	Perizinan dan sertifikasi
	400.7.5.5	Sarana dan prasarana kesehatan
	400.7.5.6	Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.5.7	Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
400.7.6	Kesehatan Jiwa	
	400.7.6.1	Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.2	Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan
	400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
	400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
	400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen

	400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	
	400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
	400.7.7.2	Imunisasi
	400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
	400.7.7.4	Kesehatan matra
400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung	
	400.7.8.1	Pengendalian tuberkolosis
	400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
	400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
	400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
	400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang	
	400.7.9.1	Pengendalian malaria
	400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
	400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
	400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular	
	400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
	400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
	400.7.10.3	Penyakit kanker
	400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
	400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
400.7.11	Penyehatan lingkungan	
	400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
	400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum
	400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
	400.7.11.4	Higien sanitasi pangan

	400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
400.7.12	Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	
400.7.13	Gizi	
	400.7.13.1	Gizi makro
	400.7.13.2	Gizi mikro
	400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik
	400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
	400.7.13.5	Kewaspadaan gizi
400.7.14	Kesehatan ibu	
	400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
	400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
	400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
	400.7.14.4	Keluarga berencana
	400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi
400.7.15	Kesehatan anak	
	400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi
	400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah
	400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko
	400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja
	400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak
400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer	
	400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan
	400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan
	400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer
	400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan
400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga	
	400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja
	400.7.17.2	Kapasitas kerja
	400.7.17.3	Lingkungan kerja
	400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja
	400.7.17.5	Kesehatan perkotaan
	400.7.17.6	Kesehatan olahraga

400.7.18	Obat Publk dan perbekalan kesehatan	
	400.7.18.1	Harga obat publik
	400.7.18.2	Pengadaan obat
	400.7.18.3	Perbekalan kesehatan
400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan	
	400.7.19.1	Alat kesehatan
	400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat
	400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga
400.7.20	Kefarmasian	
	400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian
	400.7.20.2	Farmasi klinis
	400.7.20.3	Farmasi Komunitas
	400.7.20.4	Penggunaan obat rasional
400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian	
	400.7.21.1	Obat tradisional
	400.7.21.2	Kosmetik dan makanan
	400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus
	400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat
400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	
	400.7.22.1	Surat keterangan
	400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan
400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan	
	400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
	400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan
	400.7.23.3	Pemantauan dan informasi
	400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan
	400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana
400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	
	400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun
	400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
400.7.25	Intelegensia Kesehatan	

	400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
	400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
400.7.26	Kesehatan Haji	
	400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
	400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
400.7.27	Promosi Kesehatan	
	400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
	400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
	400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan
	400.7.27.4	Hari kesehatan
400.7.28	Data dan Informasi	
	400.7.28.1	Statistik kesehatan
	400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi
	400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
400.7.29	Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen	
	400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
	400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
	400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
	400.7.29.4	Obat Asli Indonesia
400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	
	400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan
	400.7.30.2	Standardisasi produk pangan
	400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
	400.7.30.4	Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan

400.7.30.5 Pengawasan produk dan bahan berbahaya

400.7.31 Rekam Medis

400.8 AGAMA DAN KEPERCAYAAN

400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.8.2 Fasilitasi

400.8.2.1 Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota

400.8.2.2 Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan

400.8.2.3 Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayan

400.8.2.4 Kasus Keagamaan

400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan

400.8.3 Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME

400.8.3.1 Kelembagaan dan Kepercayaan

400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama

400.8.3.3 Komunitas Kepercayaan

400.8.3.4 Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional

400.8.3.5 Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial

400.9 SOSIAL

400.9.1 Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.9.2 Kesejahteraan Sosial Anak

400.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita

400.9.2.2 Kesejahteraan sosial anak terlantar

400.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum

400.9.2.4 Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan

400.9.2.5 Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus

400.9.3 Rehabilitasi Sosial

	400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
	400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi social
	400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social
400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	
	400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung
	400.9.4.2	Tuna susila dan korban traffking perempuan
	400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
	400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	
400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia	
	400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti
	400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
	400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial	
400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	
400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	
	400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
	400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
	400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah

400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	
	400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
	400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
	400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
	400.9.10.4	Kerjasama
400.9.11	Jaminan Sosial	
	400.9.11.1	Seleksi dan vrifikasi
	400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
	400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
	400.9.11.4	Kerjasama
400.9.12	Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial	
	400.9.12.1	Ketahanan keluarga
	400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
	400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
	400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
	400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
400.9.13	Pemberdayaan komunitas adat terpencil	
	400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan
	400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia
	400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi
	400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
	400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan
400.9.14	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan	
	400.9.14.1	Identifikasi dan analisis
	400.9.14.2	Pengembangan kapasitas
	400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh

400.9.14.4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas

400.9.14.5 Bantuan Langsung

400.9.14.6 Kerjasama Kelembagaan

400.9.15 Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

400.9.15.1 Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan

400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan

400.9.15.3 Pengembangan kesetiakawanan sosial

400.9.15.4 Pengelolaan taman makam pahlawan

400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

400.10.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.10.2 Pemerintahan Desa dan Kelurahan

400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan

400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan

400.10.2.3 Fasilitasi Permusyawaratan Desa

400.10.2.4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa

400.10.3 Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat

400.10.3.1 Lembaga Masyarakat

400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif

400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat

400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan

400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat

400.10.4 Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

400.10.4.1 Budaya Nusantara

400.10.4.2 Pemberdayaan Perempuan

400.10.4.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial

400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan

400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat

400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan

400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam

400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran

400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga

400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal

400.10.6 Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan

400.10.6.1 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan

400.10.6.2 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan

400.10.6.3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan

400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan

400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan

400.10.7 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.11.2 Pertamanan

400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan

400.11.2.2 Taman Kota

400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota

400.11.3 Pemakaman

400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman

400.11.3.2 Pemakaman

400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman

400.11.4 Jalur Hijau

400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau

400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan

400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air

400.11.5 Peran Serta Masyarakat
400.11.6 Pengawasan dan Penindakan
400.11.7 Pengelolaan Data
400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan

400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
400.12.2 Pendaftaran Penduduk
400.12.2.1 Identitas Penduduk
400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI
400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara
400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan
400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.3 Pencatatan Sipil
400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian
400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian
400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan
400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan
400.12.3.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.4 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.1 Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.2 Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.3 Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
400.12.4.4 Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
400.12.4.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
400.12.5 Pengembangan Kebijakan Kependudukan
400.12.5.1 Kuantitas Penduduk
400.12.5.2 Kualitas Penduduk

400.12.5.3 Mobilitas Penduduk

400.12.5.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk

400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi

400.12.6 Penyerasian Kependudukan

400.12.6.1 Indikator Kependudukan

400.12.6.2 Proyeksi Penduduk

400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan

400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah

400.12.6.5 Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah

400.13 KELUARGA BERENCANA

400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk

400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data

400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan

400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk

400.13.3.1 Penyiapan fasilitas

400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan

400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk

400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk

400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk

400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk

400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter

400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter

400.13.6 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk

400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi

400.13.6.2 Pemanfaatan parameter

400.13.7 Pengembangan Sistem

400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal

400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

400.13.8 Pengembangan Materi

400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal

400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

400.13.9 Monitoring dan Evaluasi

400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal

400.13.9.2 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal

400.13.10 Analisis Sosial

400.13.11 Analisis Ekonomi

400.13.12 Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan

400.13.13 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

400.13.14 Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah

400.13.15 Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana

400.13.16 Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah

400.13.16.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah

400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah

400.13.17 Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta

400.13.18 Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta

400.13.19 Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta

400.13.19.1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta

400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta

400.13.20 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan

400.13.20.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan

400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan

400.13.21 Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan

400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan

400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan

400.13.22 Kesertaan keluarga berencana pria

400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria

400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria

400.13.23 Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak

400.13.24 Pencegahan PMS dan HIV/AIDS

400.13.25 Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas

400.13.26 Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak

400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak

400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak

400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak

400.13.27.1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak

400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak

400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja

400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan

400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat

400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja

400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja

400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja

400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia

400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan

400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan

400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga

400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga

400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga

400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga

400.13.35.2 Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga

400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga

400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.38.2 Pengembangan Kemiitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera

400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

400.13.40.1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi

400.13.41 Advokasi dan pencitraan

400.13.42 Komunikasi, Informasi dan Edukasi

400.13.42.1 Promosi

400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi

400.13.42.3 Produk media komunikasi

400.13.43 Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi

400.13.44 Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota

400.13.45 Hubungan dengan lembaga nonpemerintah

400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah

400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah

400.13.46 Tenaga Lini Lapangan

400.13.46.1 Pengembangan tenaga lini lapangan

400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan

400.13.47 Institusi Masyarakat Pedesaan

400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan

400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan

400.13.48 Mekanisme Operasional lini lapangan

400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan

400.13.48.2 Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan

400.13.49 Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan

400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan

400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan

400.13.50 Pengumpulan dan pengolahan data

400.13.51 Analisis dan evaluasi

400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk

400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera

400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data

400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi

400.13.52.2 Pengelolaan bank data

400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi

400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi

400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi

400.13.54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi

400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan

400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi

400.14 HUBUNGAN MASYARAKAT

400.14.1	Keprotokolan	
	400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
	400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan
	400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah
	400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
400.14.2	Daftar nama/alamat kantor /pejabat	
400.14.3	Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwan bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media	
400.14.4	Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan	
	400.14.4.1	Kliping koran
	400.14.4.2	Brosur/Leaflet/poster/plakat
	400.14.4.3	Pengumuman/pemberitaan
400.14.5	Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah	
	400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah
	400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
	400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan
	400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)
	400.14.5.5	Forum Kehumasan
	400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa
400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD	
400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten	
400.14.8	Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal	
400.14.9	Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	
400.14.10	Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan	

400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan

400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN

500.1 KETAHANAN PANGAN

500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah

500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

500.1.2.1 Ketersediaan Pangan

500.1.2.2 Akses Pangan

500.1.2.3 Kerawanan Pangan

500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan

500.1.3.1 Distribusi Pangan

500.1.3.2 Harga Pangan

500.1.3.3 Cadangan Pangan

500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan

500.1.4.1 Konsumsi Pangan

500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan

500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar

500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan

500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan

500.1.5.2 Penghargaan Ketahan Pangan

500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)

500.1.7 Bimbingan Teknis

500.1.8 Evaluasi

500.2 PERDAGANGAN

500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri

500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha

500.2.2.2 Bisa Usaha Jasa Perdangan

500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan

500.2.2.4 Informasi Perusahaan

500.2.2.5 Pelaku Pasar

500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah

	500.2.2.7	Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah
	500.2.2.8	Pengembangan Produk Lokal
	500.2.2.9	Pencitraan Produk Dalam Negeri
	500.2.2.10	Pengembangan Sarana Distribusi
	500.2.2.11	Pengelolaan Sarana Distribusi
	500.2.2.12	Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik
	500.2.2.13	Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik
	500.2.2.14	Informasi Pasar
	500.2.2.15	Informasi Hasil Industri
	500.2.2.16	Barang Strategis
	500.2.2.17	Bahan Pokok Agro
500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
	500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar
	500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi
	500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar
	500.2.3.4	Tata usaha
	500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi
	500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
	500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
	500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan
	500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri
	500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
	500.2.3.11	Jasa
	500.2.3.12	Kerjasama
	500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama
	500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian
	500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran
	500.2.3.16	Pengawasan
	500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
	500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP

500.2.4 Perdagangan Berjangka Komoditi

500.2.4.1 Pengkajian pasar

500.2.4.2 Pengawasan Transaksi

500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit

500.2.4.4 Pengkajian pasar

500.2.4.5 Pengembangan Pasar

500.2.4.6 Sistem informasi

500.2.4.7 Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang

500.2.4.8 Pengawasan pasar lelang

500.2.4.9 Pengawasan sistem gudang

500.2.5 Bimbingan Teknis

500.2.6 Evaluasi

500.3 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

500.3.1 Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.3.2 Kelembagaan Koperasi dan UKM

500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi

500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM

500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi

500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas

500.3.3 Produksi

500.3.3.1 Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

500.3.3.2 Kehutanan dan Perkebunan

500.3.3.3 Perikanan dan Peternakan

500.3.3.4 Industri Kerajinan dan Pertambangan

500.3.3.5 Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha

500.3.4 Pembiayaan

500.3.4.1 Program Pendanaan

500.3.4.2 Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam

500.3.4.3 Urusan Permodalan

500.3.4.4 Asuransi dan Jasa Keuangan

500.3.4.5 Pembiayaan dan Penjaminan Kredit

500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)

500.3.5 Pemasaran dan Jaringan Usaha

500.3.5.1 Perdagangan Dalam Negeri

500.3.5.2 Ekspor dan Impor

500.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran

500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha

500.3.5.5 Informasi dan Publikasi Bisnis

500.3.5.6 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM

500.3.6 Pengembangan Sumber Daya Manusia

500.3.6.1 Pengembangan Kewirausahaan

500.3.6.2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM

500.3.6.3 Peran Serta Masyarakat

500.3.6.4 Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM

500.3.6.5 Advokasi

500.3.7 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha

500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu

500.3.7.2 Restrukturisasi Usaha

500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)

500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK

500.3.7.5 Pengembangan Sarana Bisnis

500.3.8 Pengkajian Sumber Daya UKMK

500.3.8.1 Penelitian Koperasi

500.3.8.2 Penelitian UKM

500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya

500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK

500.3.9 Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga

500.3.10 Pedagang Kaki Lima (PKL)

500.3.10.1 Peraturan Perundang-Undangan

500.3.10.2 Sarana dan Prasarana

500.3.11 Monitoring dan Evaluasi

500.4 KEHUTANAN

500.4.1 Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.4.2	Penyuluhan	
	500.4.2.1	Program Kerja Penyuluhan
	500.4.2.2	Materi Penyuluhan
	500.4.2.3	Program Penyuluhan
	500.4.2.4	Sarana Penyuluhan
	500.4.2.5	Pengembangan Tenaga Penyuluhan
	500.4.2.6	Pelaksanaan Penyuluhan
	500.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat
	500.4.2.8	Deseminasi
	500.4.2.9	Evaluasi, dan Laporan
500.4.3	Planologi Kehutanan	
	500.4.3.1	Perencanaan Makro Kawasan Hutan
	500.4.3.2	Penataan Ruang Kawasan Hutan
	500.4.3.3	Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan
	500.4.3.4	Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan
	500.4.3.5	Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan
	500.4.3.6	Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan
	500.4.3.7	Inventarisasi Sumber Daya Hutan
	500.4.3.8	Pemantauan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.9	Pemetaan Sumber Daya Hutan
	500.4.3.10	Jaringan Data Spasial
	500.4.3.11	Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.12	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.13	Informasi Penggunaan Kawasan Hutan
	500.4.3.14	Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
	500.4.3.15	Penyiapan Areal Pemanfaatan Hutan
	500.4.3.16	Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
500.4.4	Bina Usaha Kehutanan	

500.4.4.1	Data areal HPH /HTI/IUPHHK
500.4.4.2	SK HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.3	Kerjasama
500.4.4.4	Pembatalan/Penolakan
500.4.4.5	Perpanjangan
500.4.4.6	Modal dan Peralatan
500.4.4.7	Investasi Industri
500.4.4.8	Peralatan
500.4.4.9	Tenaga Kerja
500.4.4.10	Pemegang Saham
500.4.4.11	Neraca Perusahaan
500.4.4.12	Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
500.4.4.13	Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH)
500.4.4.14	Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT)
500.4.4.15	Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan (RKL)
500.4.4.16	Target Produksi RKT dan Beban Kerja
500.4.4.17	Produksi Kayu
500.4.4.18	Produksi non kayu
500.4.4.19	Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.20	Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.21	Industri Non Kayu
500.4.4.22	Hutan Tanaman Industri Pulp
500.4.4.23	Hutan Tanaman Industri Pertukangan
500.4.4.24	Pelanggaran dan Sanksi
500.4.4.25	Pemblokiran
500.4.4.26	Denda
500.4.4.27	Pencabutan Areal HPH/HTI/IUPHHK
500.4.4.28	Pola Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.29	Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi
500.4.4.30	Informasi Sumber Daya Hutan Produksi
500.4.4.31	Pengembangan Investasi Usaha

	500.4.4.32	Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.33	Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil
	500.4.4.34	Produksi Hutan Alam
	500.4.4.35	Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam
	500.4.4.36	Pengembangan Hutan Tanaman Industri
	500.4.4.37	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat
	500.4.4.38	Pengembangan Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi
	500.4.4.39	Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
	500.4.4.40	Pembiayaan Hutan Tanaman
	500.4.4.41	Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan
	500.4.4.42	Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.43	Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan
	500.4.4.44	Penertiban Peredaran Hasil Hutan
	500.4.4.45	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.46	Pengendalian Bahan Baku dan Industri Primer Hasil Hutan
	500.4.4.47	Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.4.48	Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK
	500.4.4.49	Pembinaan TPTI/TPTJ/Silvikultur
500.4.5	Standardisasi dan Lingkungan	
	500.4.5.1	Standardisasi
	500.4.5.2	Sarana Pengujian Hasil Hutan
	500.4.5.3	Pengembangan
	500.4.5.4	Pemasaran Hasil Hutan
	500.4.5.5	Pengendalian Lingkungan
	500.4.5.6	Angkutan Hasil Hutan

	500.4.5.7	Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.8	Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.9	Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan
	500.4.5.10	Pass Angkutan Hasil Hutan
	500.4.5.11	Sertifikat Ekspor Hasil Hutan
500.4.6	Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	
	500.4.6.1	Flora dan Fauna yang Dilindungi
	500.4.6.2	Flora dan Fauna yang Tidak Dilindungi
	500.4.6.3	Lembaga Konservasi/Kebun Binatang
	500.4.6.4	Konvensi Keanekaragaman Hayati
	500.4.6.5	Kawasan Konservasi
	500.4.6.6	Pengamanan Hutan
	500.4.6.7	Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan
	500.4.6.8	Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan
	500.4.6.9	Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.4.6.10	Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
	500.4.6.11	Bina Cinta Alam
	500.4.6.12	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
	500.4.6.13	Data organisasi pencinta alam dan kader konservasi SDA
500.4.7	Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial	
	500.4.7.1	Pengelolaan Benih
	500.4.7.2	Kebun Benih
	500.4.7.3	Tegakan Benih
	500.4.7.4	Pengadaan Benih
	500.4.7.5	Pengujian dan Penyimpanan Benih
	500.4.7.6	Lalu Lintas Angkutan Benih
	500.4.7.7	Pembibitan
	500.4.7.8	Lalu Lintas Angkutan Benih

	500.4.7.9	Pengembangan Usaha Perbenihan
	500.4.7.10	Pengendalian Peredaran Benih
	500.4.7.11	Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	500.4.7.12	Tanaman Reboisasi
	500.4.7.13	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
	500.4.7.14	Perhutanan Sosial
	500.4.7.15	Pengendalian Perladangan
500.4.8	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
	500.4.8.1	Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan
	500.4.8.2	Monitoring dan Evaluasi Penelitian
	500.4.8.3	Diseminasi
	500.4.8.4	Gelar Teknologi
	500.4.8.5	Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
500.5	KELAUTAN DAN PERIKANAN	
500.5.1	Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
500.5.2	Perikanan Tangkap	
	500.5.2.1	Data dan Statistik Perikanan Tangkap
	500.5.2.2	Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan
	500.5.2.3	Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan
	500.5.2.4	Pendaftaran Kapal Perikanan
	500.5.2.5	Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan
	500.5.2.6	Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan
	500.5.2.7	Alokasi Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.8	Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan
	500.5.2.9	Verifikasi Dokumen Penangkapan Ikan
	500.5.2.10	Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan

	500.5.2.11	Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan
	500.5.2.12	Kelembgaan Usaha Penangkapan
	500.5.2.13	Investasi dan Permodalan Usaha
	500.5.2.14	Kenelayanan
	500.5.2.15	Pembinaan Pengelolaan Usaha
	500.5.2.16	Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapan Ikan
500.5.3	Perikanan Budidaya	
	500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
	500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
	500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
	500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
	500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenihan
	500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
	500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
	500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
	500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
	500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
	500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
	500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
	500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
	500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya
	500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagaakerjaan
	500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
500.5.4	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
	500.5.4.2	Pengembangan Produk
	500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
	500.5.4.4	Industri Pengolahan
	500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil

	500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
	500.5.4.8	Pengembangan Industri
	500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
	500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
	500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
	500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
	500.5.4.18	Pengembangan Impor
	500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
	500.5.4.20	Pelayanan Usaha
	500.5.4.21	Kemitraan Usaha
	500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
	500.5.4.24	Informasi dan Promosi
500.5.5	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	
	500.5.5.1	Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi
	500.5.5.2	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I
	500.5.5.3	Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II
	500.5.5.4	Informasi dan Evaluasi Spasial
	500.5.5.5	Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi
	500.5.5.6	Konservasi Wawasan
	500.5.5.7	Konservasi Jenis Ikan

	500.5.5.8	Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan
	500.5.5.9	Mitigasi Bencana Lingkungan
	500.5.5.10	Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan
	500.5.5.11	Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut
	500.5.5.12	Rehabilitasi dan Reklamasi
	500.5.5.13	Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.14	Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.15	Investasi dan Promosi Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.16	Sarana dan Prasarana Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.5.17	Akses Permodalan
	500.5.5.18	Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
	500.5.5.19	Sosial Budaya Masyarakat
	500.5.5.20	Pengembangan Usaha
500.5.6	Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	
	500.5.6.1	Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat
	500.5.6.2	Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur
	500.5.6.3	Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran
	500.5.6.4	Pengawasan Usaha Budidaya
	500.5.6.5	Pengawasan Ekosistem Perairan dan Kawasan Konservasi
	500.5.6.6	Pengawasan Pencemaran Perairan
	500.5.6.7	Pengawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Terkecil
	500.5.6.8	Pengawasan Jasa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati
	500.5.6.9	Logistik dan Operasional Wilayah Barat
	500.5.6.10	Logistik dan Operasional Wilayah Timur
	500.5.6.11	Perawatan Kapal Pengawas

	500.5.6.12	Pengawakan Kapal Pengawas
	500.5.6.13	Sistem Pemantauan
	500.5.6.14	Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan
	500.5.6.15	Pemantauan Sumber Daya Perikanan
	500.5.6.16	Pengembangan Infrastruktur Pengawasan
	500.5.6.17	Penyidikan
	500.5.6.18	Penanganan Barang Bukti dan Awak Kapal
	500.5.6.19	Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan
	500.5.6.20	Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran
500.5.7	Karantina Ikan	
	500.5.7.1	Pemeriksaan Ikan
	500.5.7.2	Penahanan
	500.5.7.3	Pengasingan
	500.5.7.4	Pengamatan
	500.5.7.5	Pengakuan
	500.5.7.6	Penolakan
	500.5.7.7	Pemusnahan
	500.5.7.8	Persyaratan lalu Lintas Pemasukan
	500.5.7.9	Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran
	500.5.7.10	Permohonan Sertifikat
	500.5.7.11	Pemasukan Formulir
	500.5.7.12	Pemasukan Sertifikat
	500.5.7.13	Evaluasi dan Monitoring Sertifikat
	500.5.7.14	Surat Perintah
	500.5.7.15	Rekomendasi
	500.5.7.16	Penutupan Suatu Area
	500.5.7.17	Pelanggaran Lalu Lintas Ikan
	500.5.7.18	Pengawasan Peraturan Perkarantinaan
	500.5.7.19	Pengawasan Pelaksanaan Operasional
	500.5.7.20	Instalasi Karantina Sementara
	500.5.7.21	Lokasi Karantina

500.6 PERTANIAN

500.6.1 Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.6.2 Perlindungan hortikultura

500.6.2.1 Perlindungan Tanaman Buah

500.6.2.2 Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat

500.6.2.3 Perlindungan Tanaman Florikultura

500.6.2.4 Dampak iklim dan Persyaratan Teknis

500.6.3 Perbenihan Hortikultura

500.6.3.1 Penilaian Varietas

500.6.3.2 Pengawasan Mutu Benih

500.6.3.3 Budidaya dan Pascapanen Florikultura

500.6.4 Perluasan dan Pengelolaan Lahan

500.6.4.1 Basis Data Lahan

500.6.4.2 Pengendalian Lahan

500.6.4.3 Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan

500.6.4.4 Perluasan Kawasan Tanaman Pangan

500.6.4.5 Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

500.6.5 Pengelolaan Air Irigasi

500.6.5.1 Pengembangan Sumber Air

500.6.5.2 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air

500.6.5.3 Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup

500.6.5.4 Kelembagaan

500.6.6 Pembiayaan Pertanian

500.6.6.1 Pembiayaan Program

500.6.6.2 Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama

500.6.6.3 Pembiayaan agribisnis

500.6.6.4 Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis

500.6.7 Pupuk Pestisida

500.6.7.1 Pupuk Organik dan Pembenah Tanah

500.6.7.2 Pupuk Anorganik

500.6.7.3 Pestisida

	500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian	
	500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
	500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan	
	500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
	500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
	500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
	500.6.9.4	Kelembagaan Benih
500.6.10	Budidaya Serealia	
	500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
	500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
	500.6.10.3	Jagung
	500.6.10.4	Serealia Lain
500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	
	500.6.11.1	Kedelai
	500.6.11.2	Ubi Kayu
	500.6.11.3	Aneka Kacang
	500.6.11.4	Aneka Umbi
500.6.12	Tanaman Pangan	
	500.6.12.1	Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
	500.6.12.3	Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
	500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu
500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan	
	500.6.13.1	Padi
	500.6.13.2	Jagung dan Serealia alin
	500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
	500.6.13.4	Aneka Umbi
500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian	
	500.6.14.1	Tanaman Pangan
	500.6.14.2	Holtikurtura
	500.6.14.3	Perkebunan
	500.6.14.4	Peternakan

500.6.15 Mutu dan Standariasi
- 500.6.15.1 Standardisasi
- 500.6.15.2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu
- 500.6.15.3 Akreditasi dan Kelembagaan
- 500.6.15.4 Kerjasama dan Harmonisasi

500.6.16 Pengembangan Usaha dan Investasi
- 500.6.16.1 Kemitraan dan Kewirausahaan
- 500.6.16.2 Investasi
- 500.6.16.3 Promosi Dalam Negeri
- 500.6.16.4 Promosi Luar Negeri

500.6.17 Pemasaran Domestik
- 500.6.17.1 Informasi Pasar
- 500.6.17.2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
- 500.6.17.3 Sarana dan Kelembagaan Pasar
- 500.6.17.4 Jaringan Pemasaran

500.6.18 Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat

500.6.19 Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
- 500.6.19.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan
- 500.6.19.2 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi

500.6.20 Diseminasi

500.6.21 Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
- 500.6.21.1 Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
- 500.6.21.2 Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya

500.6.22 Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan

500.6.23 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan

500.6.24 Data Penelitian dan Pengembangan

500.6.25 Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan

500.6.26 Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
- 500.6.26.1 Hak Cipta

500.6.26.2 Hak Paten Sederhana
500.6.26.3 Hak Paten Biasa
500.6.26.4 Hak Merek
500.6.26.5 Pendaftaran Varietas Tanaman
500.6.26.6 Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak
500.6.27 Pelayanan Perijinan Pertanian
500.6.27.1 Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
500.6.27.2 Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
500.6.27.3 Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
500.6.28 Pelayanan Hukum
500.6.28.1 Sertifikasi
500.6.28.2 Pertimbangan Hukum
500.6.29 Karantina Pertanian
500.6.29.1 Karantina Tumbuhan
500.6.29.2 Karantina Hewan
500.6.30 Bimbingan Teknis
500.6.31 Evaluasi

500.7 PETERNAKAN
500.7.1 Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan
500.7.2.1 Perbibitan Ternak, antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran
500.7.2.2 Pakan Ternak
500.7.2.3 Budidaya Ternak

500.7.2.4 Kesehatan Hewan, antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan

500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran

500.7.3 Bimbingn Teknis

500.7.4 Evaluasi

500.8 PERKEBUNAN

500.8.1 Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.8.2 Tanaman Semusim

500.8.2.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim

500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim

500.8.2.3 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim

500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim

500.8.3 Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.4 Tanaman Tahunan

500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan

500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan

500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan

500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan

500.8.5 Perlindungan Perkebunan

500.8.5.1 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan

500.8.5.2 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.5.3 Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan

500.8.5.4 Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran

500.8.6 Pascapanen dan Pembinaan Usaha

500.8.6.1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar

500.8.6.2 Pascapanen Tanaman Tahunan

500.8.6.3 Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan

500.8.6.4 Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik

500.8.7 Bimbingan Teknis Perkebunan

500.8.8 Evaluasi Perkebunan

500.9 PERINDUSTRIAN

500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.9.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama

500.9.2.1 Industri Manufaktur

500.9.2.2 Industri Agro

500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi

500.9.2.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.3 Promosi Industri
- 500.9.3.1 Industri Manufaktur
- 500.9.3.2 Promosi Industri Agro
- 500.9.3.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
- 500.9.3.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.4 Standarisasi dan Teknologi
- 500.9.4.1 Industri Manufaktur
- 500.9.4.2 Industri Agro
- 500.9.4.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
- 500.9.4.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.5 Hak atas Kekayaan Intelektual
- 500.9.5.1 Industri Manufaktur
- 500.9.5.2 Industri Agro
- 500.9.5.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
- 500.9.5.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.6 Industri Hijau
- 500.9.6.1 Industri Manufaktur
- 500.9.6.2 Industri Agro
- 500.9.6.3 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
- 500.9.6.4 Industri Kecil dan Menengah

500.9.7 Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota

500.9.8 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

500.9.9 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri

500.9.10 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri

500.9.11 Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional

500.9.12 Standarisasi
- 500.9.12.1 Standar
- 500.9.12.2 Penyiapan Penerapan
- 500.9.12.3 Infrastruktur Standar

500.9.13 Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
- 500.9.13.1 Kebijakan Industri
- 500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif
- 500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial

500.9.14 Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup
- 500.9.14.1 Industri Hijau

500.9.14.2 Lingkungan Hidup
500.9.14.3 Energi
500.9.15 Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual
500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
500.9.16 Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri
500.10 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
500.10.1 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.10.2 Rekomendasi Kegeologian
500.10.2.1 Mitigasi Gunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah
500.10.2.2 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.2.3 Pertambangan
500.10.2.4 Panas Bumi
500.10.2.5 Geosains
500.10.2.6 Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM)
500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan
500.10.3 Penelitian Kegeologian
500.10.3.1 Administrasi pelaksanaan penelitian
500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian
500.10.3.3 Administrasi penggunaan peralatan penelitian
500.10.3.4 Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi
500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian
500.10.3.6 Sumber Daya Geologi
500.10.3.7 Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
500.10.3.8 Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
500.10.3.9 Survei Geologi
500.10.4 Inventarisasi dan evaluasi kegeologian
500.10.4.1 Sumber Daya Geologi

	500.10.4.2	Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
	500.10.4.3	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.4.4	Survei Geologi
	500.10.4.5	Konservasi
500.10.5	Administrasi Pelayanan Kegeologian dan Penyajian Data dan Informasi	
	500.10.5.1	Peta potensi dan sebaran
	500.10.5.2	Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan
	500.10.5.3	Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/Gas serta kebakaran Batubara
	500.10.5.4	Survei Geologi
500.10.6	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.6.1	Rencana Induk Jaringan Gas Bumi
	500.10.6.2	Rencana dan Realisasi Investasi
	500.10.6.3	Penetapan Harga Minyak Mentah
	500.10.6.4	Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi
	500.10.6.5	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
	500.10.6.6	Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
	500.10.6.7	Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri
	500.10.6.8	Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) dan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.7	Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.7.1	Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional)

	500.10.7.2	Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemanfaatan Data Migas untuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Izin Pengiriman Data ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan
	500.10.7.3	Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis/ Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Inventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi
	500.10.7.4	Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD)
	500.10.7.5	Perpanjangan Kontrak KKS
	500.10.7.6	Penetapan Alokasi dan Harga Gas
	500.10.7.7	Partisipasi Interest
	500.10.7.8	Tumpang Tindih Lahan
500.10.8	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi	

	500.10.8.1	Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, antara lain: Pedoman dan Prosedur, Layanan Usaha (Izin/rekomendasi/penandasahan), Pengawasan
	500.10.8.2	Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran
	500.10.8.3	Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
500.10.9	Teknik dan Lingkungan	
	500.10.9.1	Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
	500.10.9.2	Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT), antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT
	500.10.9.3	Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR)
	500.10.9.4	Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las
	500.10.9.5	Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi
	500.10.9.6	Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi

	500.10.9.7	Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan
	500.10.9.8	Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir, antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi
	500.10.9.9	Penghargaan Keselamatan Kerja, antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi
	500.10.9.10	Usaha penunjang
500.10.10	Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi	
	500.10.10.1	Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.2	Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.10.4	Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi
500.10.11	Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi	
	500.10.11.1	Usulan Wilayah Kerja Panas Bumi
	500.10.11.2	Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga

	500.10.11.3	Penyiapan Program Pemanfaatan Energi
	500.10.11.4	Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT
	500.10.11.5	Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT
	500.10.11.6	Penyusunan Neraca Energi
	500.10.11.7	Road Map di Bidang EBT
500.10.12	Panas Bumi	
	500.10.12.1	Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
	500.10.12.2	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI)
	500.10.12.3	Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan
	500.10.12.4	Rekomendasi Bahan Peledak
	500.10.12.5	Perizinan penggunaan gudang bahan peledak
	500.10.12.6	Izin Tangki Bahan Bakar Cair
	500.10.12.7	Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS) dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las
	500.10.12.8	Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP)
	500.10.12.9	Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB)
	500.10.12.10	Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL)
	500.10.12.11	Penetapan kapasitas usaha panas bumi
	500.10.12.12	Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
	500.10.12.13	Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi
	500.10.12.14	Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi
	500.10.12.15	Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi
	500.10.12.16	Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi

	500.10.12.17	Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi
500.10.13	Bioenergi	
	500.10.13.1	Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN)
	500.10.13.2	Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN)
	500.10.13.3	Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor
	500.10.13.4	Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIP BBN)
	500.10.13.5	Evaluasi/Revisi HIP BBN
	500.10.13.6	Database Pengusahaan Bioenergi
	500.10.13.7	Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik
	500.10.13.8	Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati
	500.10.13.9	Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga
500.10.14	Aneka Energi	
	500.10.14.1	Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi
	500.10.14.2	Penetapan Kapasitas Usaha
	500.10.14.3	Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
	500.10.14.4	Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham
	500.10.14.5	Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB)
500.10.15	Konservasi Energi	
	500.10.15.1	Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi
	500.10.15.2	Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi
	500.10.15.3	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di pengguna energi di atas 6.000 TOE

	500.10.15.4	Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast
	500.10.15.5	Penyusunan daftar peralatan/teknologi efisiensi
	500.10.15.6	Penyusunan emisi energi gas rumah kaca
	500.10.15.7	Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi
	500.10.15.8	Profil investasi efisiensi energi
	500.10.15.9	Invesment Grade Audit (IGA)
	500.10.15.10	Bimbingan Teknis Bidang EBTKE
500.10.16	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur EBTKE	
	500.10.16.1	Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga
	500.10.16.2	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
	500.10.16.3	Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE
	500.10.16.4	Evaluasi Program Kerja
500.10.17	Bina Program Tenaga Listrik	
	500.10.17.1	Investasi dan pendanaan tenaga listrik, antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik
	500.10.17.2	Pengembangan listrik pedesaan, antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu
	500.10.17.3	Data dan Informasi Ketenagalistrikan

500.10.18	Bina Usaha Ketenagalistikan	
	500.10.18.1	Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, antara lain: Pelayanan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data Laporan Berkala Pemegang Izin
	500.10.18.2	Harga dan Subsidi Listrik
	500.10.18.3	Hubungan komersial tenaga listrik
	500.10.18.4	Perlindungan konsumen listrik, antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero)
500.10.19	Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan	
	500.10.19.1	Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan
	500.10.19.2	Penyiapan kompetensi dan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan
	500.10.19.3	Usaha penunjang ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB)
	500.10.19.4	Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup sektor

		ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM)
500.10.20	Sertifikasi	
	500.10.20.1	Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik
	500.10.20.2	Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
	500.10.20.3	Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO) Instalasi Tenaga Listrik
	500.10.20.4	Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik
	500.10.20.5	Registrasi Sertifikasi
500.10.21	Akreditasi Ketenagalistrikan	
500.10.22	Standarisasi Kompetensi	
500.10.23	Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan	
	500.10.23.1	Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.2	Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.3	Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
	500.10.23.4	Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan
500.10.24	Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan	
	500.10.24.1	Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.2	Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan
	500.10.24.3	Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis)
	500.10.24.4	Laporan berkala pemegang penunjukan LIT
	500.10.24.5	Laporan hasil pengawasan penunjukan

500.10.25 Bina Program Mineral dan Batubara

500.10.25.1	Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara
500.10.25.2	Rencana Induk Mineral dan Batubara
500.10.25.3	Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batubara
500.10.25.4	Data dan Informasai Mineral dan Batubara
500.10.25.5	Pelaporan Program Mineral dan Batubara
500.10.25.6	Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batubara melalui lelang reguler
500.10.25.7	Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batubara
500.10.25.8	Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara
500.10.25.9	Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara

500.10.26 Pembinaan Pengusahaan Mineral

500.10.26.1	Ketenagakerjaan
500.10.26.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
500.10.26.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral
500.10.26.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral
500.10.26.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi mineral
500.10.26.6	Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang)
500.10.26.7	Perizinan usaha pertambangan mineral
500.10.26.8	Kontrak Karya (KK)
500.10.26.9	Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK)
500.10.26.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)

	500.10.26.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral
	500.10.26.12	Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK)
	500.10.26.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral
	500.10.26.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.26.15	Pelaporan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.16	Penghargaan usaha pertambangan mineral
	500.10.26.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral
500.10.27	Pembinaan Pengusahaan Batubara	
	500.10.27.1	Ketenagakerjaan
	500.10.27.2	Pemberdayaan masyarakat sekitar tambang
	500.10.27.3	Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.4	Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.5	Laporan/data kegiatan eksplorasi batubara
	500.10.27.6	Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B, IUP hingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara
	500.10.27.7	Perizinan Usaha Pertambangan Batubara
	500.10.27.8	Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)

	500.10.27.9	Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B), antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2B hingga Data Asset Perusahaan Batubara
	500.10.27.10	Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS)
	500.10.27.11	Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.12	Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B)
	500.10.27.13	Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara
	500.10.27.14	Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir
	500.10.27.15	Pelaporan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.16	Penghargaan usaha pertambangan batubara
	500.10.27.17	Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara
500.10.28	Penerimaan Negara	
	500.10.28.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak
	500.10.28.2	Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
	500.10.28.3	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP
500.10.29	Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	
	500.10.29.1	Perumusan RSNI (Rancangan Standar Nasional Indonesia)/ RSKKNI (Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional

	Indonesia), antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI)
500.10.29.2	Pengawasan Standardisasi
500.10.29.3	Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang
500.10.29.4	Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, antara lain: Laporan Kecelakaan Tambang/Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
500.10.29.5	Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi
500.10.29.6	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
500.10.29.7	Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)
500.10.29.8	Rekomendasi bahan kimia
500.10.29.9	Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Penetapan Jaminan Pasca Tambang
500.10.29.10	Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi, antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5) hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi

	500.10.29.11	Pemberian Penghargaan, antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan
	500.10.29.12	Pengawasan lingkungan pertambangan
	500.10.29.13	Usaha Jasa Mineral dan Batubara
	500.10.29.14	Pembinaan dan pengawasan usaha jasa mineral dan batubara
	500.10.29.15	Rekomendasi Teknis, antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis
	500.10.29.16	Persetujuan Teknis, antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis
	500.10.29.17	Pengawasan Teknis
	500.10.29.18	Pengawasan Konservasi Mineral dan Batubara
	500.10.29.19	Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis/Sosialisasi Pertambangan
500.10.30	Program Penelitian dan Pengembangan	
	500.10.30.1	Rencana Penelitian dan Pengembangan
	500.10.30.2	Pengembangan dan inovasi
	500.10.30.3	Dokumen penerapan/pemanfaatan/pendayagunaan/replikasi/prot

		otipe hasil penelitian/ pengkajian/pengembangan/ inovasi
	500.10.30.4	Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi
	500.10.30.5	Diseminasi hasil penelitian,pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.6	Pembinaan penelitian/Pengembangan,p engkajian, dan penerapan ilmu pengetahunan dan teknologi
	500.10.30.7	Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.8	Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.9	Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.10	Hak atas kekayaan intelektual (HaKI)
	500.10.30.11	Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
	500.10.30.12	Layanan jasa penelitian, pengembangan,penerapan IPTEK
	500.10.30.13	Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral
500.10.31	Sarana Litbang	
	500.10.31.1	Administrasi penggunaan peralatan
	500.10.31.2	Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi
500.10.32	Afiliasi	
	500.10.32.1	Proyek Percontohan
	500.10.32.2	Promosi dan Layanan Jasa Teknologi
	500.10.32.3	Pembinaan Penelitian dan Pengembangan

500.10.32.4 Penyajian Informasi

500.10.33 Penelitian dan Pengembangan Kegeologian

500.10.33.1 Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelautan

500.10.33.2 Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai

500.10.33.3 Penelitian sumber daya energi dan mineral kelautan

500.10.33.4 Penelitian Sumber Daya Mineral Kelautan

500.10.34 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi

500.10.34.1 Teknologi Eksplorasi

500.10.34.2 Teknologi Eksploitasi

500.10.34.3 Laboratorium

500.10.34.4 Study

500.10.34.5 Teknologi Proses

500.10.34.6 Teknologi Aplikasi Produk

500.10.34.7 Teknologi Gas

500.10.35 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara

500.10.35.1 Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya

500.10.35.2 Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral

500.10.35.3 Teknologi Pemanfaatan Batubara

500.10.36 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan

500.10.36.1 Energi baru terbarukan

500.10.36.2 Teknologi Ketenagalistrikan

500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi

500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi

500.11 PERHUBUNGAN

500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.11.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan

500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang

500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C

500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama

500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal

500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi

500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer

500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer

500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal

500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder

500.11.3 Pengembangan Transportasi Jalan

500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan

500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan

500.11.4 Pengujian Kendaraan Bermotor

500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor

500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor

500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor

500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor

500.11.5 Teknologi Kendaraan Bermotor

500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor

500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor

500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor

500.11.5.4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor

500.11.6 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

500.11.6.1 Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan

500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional

500.11.7 Perlengkapan Jalan

500.11.7.1 Pedoman teknis perlengkapan jalan

500.11.7.2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan

500.11.7.3 Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor

500.11.7.4 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor

500.11.7.5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional

500.11.8 Angkutan Penumpang

500.11.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi

500.11.8.2 Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara

500.11.8.3 Izin trayek antar kota antar provinsi

500.11.8.4 Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi

500.11.8.5 Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum

500.11.8.6 Pemberian subsidi angkutan umum

500.11.8.7 Angkutan perintis

500.11.8.8 Penghargaan perusahaan angkutan umum

500.11.9 Angkutan Barang

500.11.9.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan

500.11.9.2 Tarif angkutan barang

	500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu
	500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang
	500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan
500.11.10	Monitoring Operasional	
	500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
	500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan
	500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda
500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
	500.11.11.1	Pedoman Teknis
	500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
	500.11.11.3	Bimtek PPNS
	500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan
	500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan
500.11.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
	500.11.13.1	Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)
	500.11.13.2	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.14 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

500.11.15 Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

- 500.11.15.1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.15.2 Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan penyeberangan

500.11.16 Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

- 500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan
- 500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional
- 500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.17 Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.18 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan

- 500.11.18.1 Manajemen lalu lintas
- 500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan
- 500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
- 500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau

500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan

- 500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan

500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau

500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional

500.11.21 Tarif dan Keperintisan

500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan

500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan

500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan

500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan

500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan

500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan

500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan

500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah

500.11.24 Angkutan Perkotaan

500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek

500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan

500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan

500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang

500.11.25.2 Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.25.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi

500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan

500.11.26.1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan

500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan

500.11.26.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan

500.11.26.4 Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota

500.11.26.5 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan

500.11.26.6 Masterplan transportasi perkotaan

500.11.27 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan

500.11.27.1 Monitoring dan evaluasi data kecelakaan

500.11.27.2 Kualifikasi unit pengkajian

500.11.27.3 Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

500.11.28 Pengembangan Keselamatan

500.11.28.1 Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan

500.11.28.2 Harmonisasi kebijakan

500.11.29 Promosi dan Kemitraan Keselamatan

500.11.29.1 Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

500.11.29.2 Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan

500.11.30 Bina Keselamatan Angkutan Umum

500.11.30.1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum

500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau

500.11.31 Audit Keselamatan

500.11.31.1 Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia

500.11.31.2 Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.31.3 Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan

500.11.32 Inspeksi Keselamatan

500.11.32.1 Pedoman keselamatan

500.11.32.2 Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan

500.11.32.3 Investigasi kecelakaan sungai, danau dan

			penyeberangan serta laik fungsi jalan
	500.11.33	Parkir	
		500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir
		500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta
		500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah
500.12	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.12.2	Telekomunikasi	
		500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi
		500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi
		500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika
		500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi
	500.12.3	Penyiaran	
		500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi
		500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi
	500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal	
		500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah
		500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah
		500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran
		500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal
		500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur
	500.12.5	Pengendalian Informatika	
		500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi
		500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi
		500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
		500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
	500.12.6	e- Government	
		500.12.6.1	Tata Kelola e-Government

	500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government
	500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government
	500.12.6.4	Aplikasi Layanan Kepemerintahan
	500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
500.12.7	e- Business	
	500.12.7.1	Tata Kelola e-Business
	500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business
	500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business
	500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Busniness
500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
	500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
	500.12.8.2	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan
500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika	
	500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
	500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
	500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
	500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
500.12.10	Keamanan Informasi	
	500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
	500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
	500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
	500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
	500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
500.12.11	Komunikasi Publik	
	500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
	500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
	500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
	500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan

500.12.12.2 Informasi Perekonomian
500.12.12.3 Informasi Kesejahteraan Rakyat
500.12.13 Pengelolaan Media Publik
500.12.13.1 Media Cetak
500.12.13.2 Media Online
500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual
500.12.14 Kemitraan Komunikasi
500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha
500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
500.12.15 Infrastruktur Informatika
500.12.15.1 Jaringan
500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika
500.12.15.3 Keamanan Informatika
500.12.16 Sistem dan Data
500.12.16.1 Portal dan Konten
500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data
500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi
500.12.17 Pusat Kerjasama
500.12.17.1 Kerja Sama daerah
500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral
500.12.18 Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
500.12.18.1 Pelayanan Informasi
500.12.18.2 Hubungan Masyarakat
500.12.18.3 Bimbingan Teknis
500.12.19 Evaluasi

500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.13.2 Pengembangan Destinasi Wisata
500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
500.13.2.2 Pengembangan Daya Tarik Wisata
500.13.2.3 Industri Pariwisata
500.13.2.4 Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata

	500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
500.13.3	Pemasaran Pariwisata	
	500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
	500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri
	500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri
	500.13.3.4	Pencitraan Indonesia
500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	
	500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman
	500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
	500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa
500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK	
	500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
	500.13.5.2	Desain dan Arsitektur
	500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi
500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan
	500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
	500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
	500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
500.14	STATISTIK	
	500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
	500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi
	500.14.2.1	Perencanaan

	500.14.2.2	Persiapan, antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
	500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
	500.14.2.4	Pengolahan, antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
	500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
	500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus
500.14.3	Survei	
	500.14.3.1	Perencanaan
	500.14.3.2	Persiapan
	500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan, antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel,

			Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas
		500.14.3.4	Pengolahan, antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
		500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi
		500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei
	500.14.4	Konsolidasil Data Statistik	
		500.14.4.1	Kompilasi Data
		500.14.4.2	Analisis data
		500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
		500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik
500.15	KETENAGAKERJAAN		
	500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
	500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja	
		500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
		500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
	500.15.3	Pengembangan Standarisasi Kompetensi	
		500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi
		500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
		500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan

	500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
500.15.4	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja	
	500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
	500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
	500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
	500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
500.15.5	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan	
	500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
	500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
	500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
	500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
500.15.6	Bina Pemagangan	
	500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
	500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
	500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
	500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
500.15.7	Produktivitas dan Kewirausahaan	
	500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
	500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
	500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
	500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
500.15.8	Pengembangan Pasar Kerja	
	500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja
	500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
	500.15.8.3	Bursa Kerja
	500.15.8.4	Analisis Jabatan
500.15.9	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	
	500.15.9.1	Antar Kerja

500.15.9.2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus

500.15.9.3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan

500.15.9.4 Pemberdayaan Pengantar Kerja

500.15.10 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal

500.15.10.1 Tenaga Kerja Mandiri dan Sektoral Informal

500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya

500.15.10.3 Terapan Teknologi Tepat Guna

500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga

500.15.11 Standardisasi Profesi

500.15.11.1 Sistem Informasi dan Registrasi

500.15.11.2 Pembakuan Akreditasi

500.15.12 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi

500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama

500.15.12.2 Perjanjian Kerja

500.15.12.3 Kesejahteraan Pekerja

500.15.12.4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerja

500.15.13 Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial

500.15.13.1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha

500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial

500.15.13.3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial

500.15.14 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

500.15.14.1 Pengupahan

500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja

500.15.15 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial

500.15.15.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial

	500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
	500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja
	500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
	500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	
	500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
	500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
	500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral
	500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
	500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
	500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
	500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
	500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
	500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan	
500.15.20	Bina Penegakan Hukum	
	500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
	500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan

500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum

500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K 3

500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3

500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3

500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3

500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.15.22.2 Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3

500.16 PENANAMAN MODAL

500.16.1 Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.16.2 Perencanaan Penanaman Modal

500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya

500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur

500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan

	500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur
500.16.3	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal
	500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah
	500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha
	500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
	500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
	500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
500.16.4	Promosi Penanaman Modal	
	500.16.4.1	Pengembangan Promosi
	500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi
	500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri
	500.16.4.4	Promosi Sektoral
	500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah
	500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi
500.16.5	Kerja Sama Penanaman Modal	
	500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral
	500.16.5.2	Kerja Sama Regional
	500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
500.16.6	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal
	500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal
	500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
	500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah
	500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal
	500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
500.16.7	Pelayanan Penanaman Modal	
	500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi
	500.16.7.2	Pelayanan Perijinan

500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan
500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan
500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas

500.17 PERTANAHAN
500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
500.17.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan
500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian
500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
500.17.3.1 Penatagunaan Tanah
500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik
500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah
500.17.4 Sengketa Tanah
500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa
500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian

500.18 TRANSMIGRASI
500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.18.2 Penyediaan Tanah Transmigrasi
500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah
500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah
500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan
500.18.2.4 Advokasi Pertanahan
500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi
500.18.3.1 Penyiapan Lahan
500.18.3.2 Penyiapan Sarana
500.18.3.3 Penyiapan Prasarana
500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman
500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi
500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi
500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan

	500.18.4.3	Pelaksanaan Perpindahan
	500.18.4.4	Penataan dan Adaptasi
500.18.5	Partisipasi Masyarakat	
	500.18.5.1	Promosi dan Motivasi
	500.18.5.2	Kerjasama Kelembagaan
	500.18.5.3	Kerjasama Antar Daerah
	500.18.5.4	Pelayanan Investasi
500.18.6	Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	
	500.18.6.1	Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
	500.18.6.2	Bina Sistem Informasi
	500.18.6.3	Perencanaan Pengembangan Kawasan
	500.18.6.4	Perencanaan Pengembangan Masyarakat
	500.18.6.5	Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
500.18.7	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat	
	500.18.7.1	Bantuan Pangan dan Kesehatan
	500.18.7.2	Fasilitas Sosial Budaya
	500.18.7.3	Pengembangan Kelembagaan
	500.18.7.4	Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
500.18.8	Pengembangan Usaha	
	500.18.8.1	Kewirausahaan
	500.18.8.2	Produksi
	500.18.8.3	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
	500.18.8.4	Lembaga Ekonomi dan permodalan
500.18.9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan	
	500.18.9.1	Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana
	500.18.9.2	Pengembangan Sarana
	500.18.9.3	Pengembangan Prasarana
	500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
500.18.10	Penyerasian Lingkungan	
	500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan

500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi

500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600.1 PEKERJAAN UMUM

600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.1.2 Penatagunaan Sumber Daya Air

600.1.2.1 Perencanaan Wilayah Sungai

600.1.2.2 Kelembagaan

600.1.2.3 Pemanfaatan Sumber Daya Air

600.1.2.4 Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air

600.1.2.5 Pengaturan dan Pemantauan

600.1.3 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air

600.1.3.1 Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air

600.1.3.2 Manajemen Mutu

600.1.3.3 Informasi dan Data Sumber Daya Air

600.1.3.4 Keterpaduan Pemrograman

600.1.4 Pengelolaan Sumber Daya Air

600.1.4.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai

600.1.4.2 Pengelolaan Irigasi dan Rawa

600.1.4.3 Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung

600.1.4.4 Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku

600.1.5 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

600.1.5.1 Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai

600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Irigasi dan Rawa

600.1.5.3 Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung

600.1.5.4 Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku

	600.1.5.5	Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
600.1.6	Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional)	
	600.1.6.1	Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.2	Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.3	Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.4	Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo
	600.1.6.5	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan	
	600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan
	600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan
	600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan
600.1.8	Pembangunan Jalan	
	600.1.8.1	Standar dan Pedoman
	600.1.8.2	Manajemen Konstruksi
	600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage
	600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng
600.1.9	Preservasi Jalan	
	600.1.9.1	Standar dan Pedoman
	600.1.9.2	Perencanaan Teknis
	600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi
	600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan
600.1.10	Pengelolaan Jembatan	
	600.1.10.1	Standar dan Pedoman
	600.1.10.2	Perencanaan Teknis
	600.1.10.3	Teknik Jembatan
	600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
600.1.11	Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah	
	600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
	600.1.11.2	Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar

	600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
600.1.12	Pengaturan Jalan Tol	
	600.1.12.1	Persiapan pengusahaan jalan tol
	600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
	600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
	600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol
600.1.13	Keterpaduan Infrastruktur Permukiman	
	600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
	600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
600.1.14	Pengembangan Kawasan Permukiman	
	600.1.14.1	Perencanaan Teknis
	600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
	600.1.14.3	Kawasan Permukiman Pedesaan
	600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
	600.1.14.5	Kelembagaan
600.1.15	Pembinaan Penataan Bangunan	
	600.1.15.1	Perencanaan Teknis
	600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
	600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
	600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
	600.1.15.5	Kelembagaan
600.1.16	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
	600.1.16.1	Perencanaan Teknis
	600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
	600.1.16.3	Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan
	600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
	600.1.16.5	Kelembagaan
	600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
	600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja

600.1.17 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
- 600.1.17.1 Perencanaan Teknis
- 600.1.17.2 Pengelolaan Air Limbah
- 600.1.17.3 Pengelolaan Persampahan
- 600.1.17.4 Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
- 600.1.17.5 Kelembagaan
- 600.1.17.6 Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja

600.1.18 Pemantauan dan Evaluasi

600.2 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

600.2.1 Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.2.2 Perencanaan Pembiayaan Perumahan
- 600.2.2.1 Keterpaduan Perencanaan
- 600.2.2.2 Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
- 600.2.2.3 Kemitraan

600.2.3 Pola Pembiayaan Perumahan
- 600.2.3.1 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
- 600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
- 600.2.3.3 Pola Investasi Perumahan

600.2.4 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan
- 600.2.4.1 Sumber Pembiayaan Primer
- 600.2.4.2 Sumber Pembiayaan Sekunder
- 600.2.4.3 Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
- 600.2.4.4 Sistem Pembiayaan Perumahan
- 600.2.4.5 Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan

600.2.5 Perencanaan Penyediaan Perumahan
- 600.2.5.1 Keterpaduan Perencanaan
- 600.2.5.2 Analisa Teknik
- 600.2.5.3 Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
- 600.2.5.4 Kemitraan dan Kelembagaan

600.2.6 Penyediaan Rumah Susun

	600.2.6.1	Perencanaan Teknik
	600.2.6.2	Penyediaan
	600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
	600.2.6.4	Pengelolaan
600.2.7	Penyediaan Rumah Khusus	
	600.2.7.1	Perencanaan Teknik
	600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
	600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi
	600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
	600.2.7.5	Perencanaan Teknik
	600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
	600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
600.2.8	Penyediaan Rumah Umum dan Komersial	
	600.2.8.1	Perencanaan Teknik
	600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
	600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
	600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
600.2.9	Investasi Infrastruktur	
	600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
	600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
	600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
	600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
600.2.10	Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
	600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
	600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
	600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
	600.2.10.4	Manajemen Mutu
600.2.11	Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi	
	600.2.11.1	Kelembagaan
	600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
	600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
	600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
600.2.12	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	

600.2.12.1 Standar dan Materi Kompetensi

600.2.12.2 Penerapan Kompetensi

600.2.12.3 Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi

600.2.12.4 Pengembangan Produktivitas

600.2.13 Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi

600.2.13.1 Peningkatan Kerjasama

600.2.13.2 Pemberdayaan Jasa Konstruksi

600.2.14 Peningkatan Jasa Konstruksi

600.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja

600.2.14.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu

600.2.15 Penerapan Teknologi Konstruksi

600.2.15.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi

600.2.15.2 Pengembangan Materi

600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi

600.2.16 Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)

600.2.16.1 Antar Sektor

600.2.16.2 Antar Wilayah

600.2.17 Pengembangan Kawasan Strategis

600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis

600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis

600.2.18 Pengembangan Kawasan Perkotaan

600.2.18.1 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan

600.2.18.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru

600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan

600.2.18.4 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan

600.2.18.5 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)

600.2.19 Pemantauan dan Evaluasi

600.3 TATA RUANG (TATA KOTA)

600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah

600.3.2 Perencanaan

600.3.2.1 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)

600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten

600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)

600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten

600.3.2.6 Rencana Teknis Prasarana Kota

600.3.2.7 Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota

600.3.3 Pemanfaatan dan Pengendalian

600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang

600.3.3.2 Ijin Pemanfaatan Ruang

600.3.3.3 Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang

600.3.4 Pemetaan

600.3.4.1 Peta Dasar

600.3.4.2 Survey Pemetaan Ruang Darat

600.3.4.3 Survey Pemetaan Ruang Air

600.3.4.4 Survey Pemetaan Ruang Udara

600.4 LINGKUNGAN HIDUP

600.4.1 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

600.4.2 Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana

		perlindungan dan pengelolaan Lingkungan
	600.4.2.2	Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam
600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
	600.4.3.1	Evaluasi Penerapan
	600.4.3.2	Perencanaan Lingkungan Hidup
600.4.4	Ekonomi Lingkungan	
600.4.5	Dampak Lingkungan	
	600.4.5.1	Bimtek Dampak Lingkungan
	600.4.5.2	Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan
	600.4.5.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan	
	600.4.6.1	Manufaktur Prasarana dan Jasa
	600.4.6.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
	600.4.6.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.6.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan	
	600.4.7.1	Manufaktur, Prasarana dan Jasa
	600.4.7.2	Pertambangan Energi, Minyak dan Gas
	600.4.7.3	Agro Industri dan Usaha Skala Kecil
	600.4.7.4	Udara Sumber Bergerak
600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan	
	600.4.8.1	Pengembangan
	600.4.8.2	Pemanfaatan
	600.4.8.3	Pengelolaan Sumber Daya Genetik
	600.4.8.4	Keamanan Hayati
	600.4.8.5	Pengendalian kerusakan Lahan
600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	
	600.4.9.1	Kerusakan Ekosistem
	600.4.9.2	Rawa
600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer	
	600.4.10.1	Perangkat mitigasi
	600.4.10.2	Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca

	600.4.10.3	Pengendalian Bahan Perusak Ozon
	600.4.10.4	Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan
600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim	
	600.4.11.1	Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim
	600.4.11.2	Kerentanan Perubahan Iklim
600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	
	600.4.12.1	Registrasi dan Notifikasi
	600.4.12.2	Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun
	600.4.12.3	Evaluasi dan Tindak Lanjut
600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun	
	600.4.13.1	Pengumpulan dan pemanfaatan
	600.4.13.2	Pengangkutan dan Pengolahan
	600.4.13.3	Penimbunan dan Dumping
	600.4.13.4	Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas
600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	
	600.4.14.1	Pemantauan
	600.4.14.2	Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi
600.4.15	Pengelolaan Sampah	
	600.4.15.1	Pembatasan sampah
	600.4.15.2	Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah
	600.4.15.3	Pembentukan Dewan Adipura
	600.4.15.4	Penetapan pemenang adipura
600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan	
	600.4.16.1	Pengelolaan dan pengembangan pengaduan
	600.4.16.2	Penataan hukum administrasi lingkungan
600.4.17	Penyelesaian Sengketa Lingkungan	

	600.4.17.1	Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
	600.4.17.2	Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
600.4.18	Penegakan hukum pidana lingkungan	
	600.4.18.1	Penyidikan
	600.4.18.2	Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
	600.4.18.3	Koordinasi pembinaan penyidik PNS
600.4.19	Komunikasi Lingkungan	
	600.4.19.1	Pengembangan Komunikasi
	600.4.19.2	Publikasi dan Kampanye
600.4.20	Penguatan Inisiatif Masyarakat	
	600.4.20.1	Komunitas Pendidikan Lingkungan
	600.4.20.2	Kearifan Lingkungan
600.4.21	Peningkatan Peran Masyarakat	
	600.4.21.1	Masyarakat Perkotaan
	600.4.21.2	Masyarakat Pedesaan
600.4.22	Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan	
	600.4.22.1	Organisasi Sosial Masyarakat
	600.4.22.2	Organisasi Profesi Dunia Usaha
600.4.23	Data dan Informasi Lingkungan	
	600.4.23.1	Pengelolaan Data
	600.4.23.2	Pengelolaan Informasi
	600.4.23.3	Pengembangan Perangkat Lunak
	600.4.23.4	Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
600.4.24	Kelembagaan Lingkungan	
	600.4.24.1	Kelembagaan dan Tata Laksana
	600.4.24.2	Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
600.4.25	Standarisasi dan teknologi	
	600.4.25.1	Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
	600.4.25.2	Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan

600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan

600.4.26 Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan

600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas LIngkungan

600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian

700 PENGAWASAN

700.1 PENGAWASAN INTERNAL

700.1.1 Rencana Pengawasan

700.1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan

700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan

700.1.1.3 Rencana Kinerja Tahunan

700.1.1.4 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan

700.1.1.5 Rakor Pengawasan Tingkat Daerah

700.1.2 Pelaksanaan Pengawasan

700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)

700.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut

700.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut

700.1.2.4 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat

700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan

700.1.2.6 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara

700.1.2.7 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi

700.1.2.8 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review

700.1.2.9 Good Corporate Governance (GCG)

800 KEPEGAWAIAN

800.1 SUMBER DAYA MANUSIA

800.1.1 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

800.1.1.1 Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan

800.1.1.2 Perencanaan Pertimbangan Formasi, antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas

800.1.1.3 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara

800.1.1.4 Standarisasi Jabatan, antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan

800.1.2 Formasi dan Pengadaan Pegawai

800.1.2.1 Formasi ASN, antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN , Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus

800.1.2.2 Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN, antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN

	800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN
	800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
	800.1.2.5	Pengangkatan ASN
	800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)
	800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
	800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
800.1.3	Mutasi Pegawai	
	800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
	800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
	800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
	800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai
	800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
	800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
800.1.4	Pengembangan Karir	
	800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
	800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
	800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
	800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
	800.1.4.5	Angka Kredit, antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit,

		Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara	
	800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
	800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
	800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
	800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
	800.1.6.2	Disiplin
	800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
	800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
	800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
	800.1.6.6	Pensiun ASN, antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Jada/Dudanya
800.1.7	Bantuan Hukum	
800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai	
	800.1.8.1	Status Kepegawaian
	800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
	800.1.8.3	Keberatan Pegawai
	800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian	
	800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
	800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
	800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik
	800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
800.1.10	Pengawasan dan pengendalian	
	800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
	800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan

		Pemberhentian Dalam Jabatan
	800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
	800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
	800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
	800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
800.1.11	Administrasi Pegawai	
	800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
	800.1.11.2	Cuti Sakit
	800.1.11.3	Cuti Bersalin
	800.1.11.4	Cuti Tahunan
	800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
	800.1.11.6	Cuti Besar
	800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
	800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
	800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
	800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
	800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
	800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
	800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
800.1.12	Kesejahteraan Pegawai	
	800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
	800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
	800.1.12.3	Tabungan Perumahan
	800.1.12.4	Bantuan Sosial
	800.1.12.5	Pakaian Dinas
	800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
	800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
	800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa

	800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
	800.1.12.10	Rekam Medis
800.1.13	Administrasi Perseorangan	
	800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
	800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
	800.1.13.4	Sekretaris Daerah
	800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
800.1.14	Penilaian Kompetensi	
	800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
	800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
800.2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
800.2.1	Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah	
800.2.2	Pendidikan dan Pelatihan	
	800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
	800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
	800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
	800.2.2.4	Modul-modul diklat
	800.2.2.5	Panduan fasilitator
	800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
	800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
	800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
	800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
800.2.3	Widyaiswara	
	800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
	800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
	800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara
	800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
	800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
	800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara

800.2.4 Penyelenggaraan Diklat

800.2.4.1 Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat

800.2.4.2 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat

800.2.4.3 Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat

800.2.4.4 Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran

800.2.4.5 Sistem informasi diklat

800.2.4.6 Monitoring Penyelenggara Diklat

800.2.4.7 Monitoring dan evaluasi Pasca diklat

800.2.5 Alumni

900 KEUANGAN

900.1 KEUANGAN DAERAH

900.1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P)

900.1.1.1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)

900.1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)

900.1.1.3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan

900.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)

900.1.2 Penyusunan Anggaran

900.1.2.1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan

900.1.2.2 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota

900.1.2.3 Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah

900.1.2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

900.1.3 Pelaksanaan Anggaran

900.1.3.1 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS

900.1.3.2 Pendapatan

900.1.3.3 Belanja

900.1.3.4 Pembiayaan Daerah

900.1.3.5 Dokumen Penatausahaan Keuangan

900.1.3.6 Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

900.1.3.7 Daftar Gaji

900.1.3.8 Kartu Gaji

900.1.3.9 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)

900.1.3.10 Laporan Keuangan

900.1.4 Pinjaman/Hibah Luar Negeri

900.1.4.1 Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)

900.1.4.2 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)

900.1.4.3 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya

900.1.4.4 Dokumen Loan Agremeent (PHLN), antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender

900.1.4.5 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: Usulan Luncuran Dana

900.1.4.6 Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya

900.1.4.7 Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)

900.1.4.8 Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya (SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya)

900.1.4.9 Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor), antara lain : No Objection Letter (NOL), Project

Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)

900.1.4.10 Staff Appraisal Report

900.1.4.11 Report /Laporan

900.1.4.12 Laporan Hutang Daerah

900.1.4.13 *Completion Report/Annual Report*

900.1.4.14 Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri

900.1.5 Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)

900.1.6 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

900.1.6.1 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

900.1.6.2 Dokumen Kebijakan Akuntansi

900.1.6.3 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi

900.1.6.4 Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran

900.1.7 Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan

900.1.7.1 Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan

900.1.7.2 Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya, antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan

900.1.7.3 Buku Rekening Bank

900.1.7.4 Keputusan Pembukuan Rekening

900.1.7.5 Pembukuan anggaran, antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP),

Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran

900.1.8 Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan

900.1.8.1 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya

900.1.8.2 Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan

900.1.9 Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD , antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD

900.1.10 Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu

900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu

900.1.10.2 Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu

900.1.10.3 Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu

termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank

900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya

900.1.11 Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah

900.1.11.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan

900.1.11.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal

900.1.11.3 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional

900.1.11.4 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah

900.1.12 Anggaran Daerah

900.1.12.1 Anggaran Daerah

900.1.12.2 Dukungan Teknis Anggaran Daerah

900.1.13 Pendapatan dan Investasi Daerah

900.1.13.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah

900.1.13.2 Badan Usaha Milik Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah

900.1.13.3 Badan Layanan Umum Daerah, antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah

900.1.13.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan , Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah

900.1.13.5 Pinjam Dan Obligasi Daerah, antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah

900.1.14 Fasilitasi Dana Perimbangan

900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum

900.1.14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus

900.1.14.3 Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam

900.1.14.4 Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya, antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya

900.1.14.5 Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan, antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan

900.1.15 Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

900.1.15.1 Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah

900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah
900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah
900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

B. PENOMORAN NASKAH DINAS

1. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas Pengaturan
(peraturan perundang-undangan):

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
KLASIFIKASI ARSIP

2. Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas Penetapan
(Keputusan):
a. Surat Keputusan yang ditandatangai oleh Bupati

KEPUTUSAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : B/001/KPTS/D.16/2024
TENTANG
PENGELOLA ARSIP

b. Surat Keputusan yang ditandatangai oleh Sekretaris Daerah/ Kepala Perangkat Daerah/ Camat atas nama Bupati

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 001/KPTS/D.16/2024
TENTANG
PENGELOLA ARSIP

Keterangan :

B	: Kode unik
001	: Nomor urut
KPTS	: Kode surat keputusan
D.16	: Kode perangkat daerah
2024	: Tahun Terbit

3. Penomoran Naskah Dinas penugasan sekurang-kurangnya memuat unsur nomor urut/kode klasifikasi arsip/kode perangkat daerah/bulan/tahun.
Contoh Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas penugasan:

SURAT PERINTAH/SURAT TUGAS
NOMOR : 000.5.3.1/001/D.16/II/2024

Keterangan:

000.5.3.1	: Kode klasifikasi
001	: Nomor urut naskah dinas
D.16	: Kode perangkat daerah
II	: Bulan naskah dinas dibuat (menggunakan romawi)
2024	: Tahun terbit

4. Penomoran Naskah Dinas korespondensi internal sekurang-kurangnya memuat unsur nomor urut/kode klasifikasi arsip/kode perangkat daerah/bulan/tahun.
Contoh Penomoran Naskah Dinas korespondensi internal :

Nomor: 001/000.5.3.1/ D.16/II/2024

Keterangan:

001	: Nomor urut naskah dinas
000.5.3.1	: kode klasifikasi
D.16	: Kode perangkat daerah
II	: Bulan naskah dinas dibuat (menggunakan romawi)
2024	: Tahun terbit

5. Penomoran Naskah Dinas korespondensi Eksternal (surat dinas) sekurang-kurangnya memuat unsur kode drajat keamanan arsip/nomor urut/kode klasifikasi arsip/kode perangkat daerah/bulan/tahun.

   Contoh Penomoran Naskah Dinas korespondensi Eksternal:

   Nomor: R/001/000.5.3.1/D.16/II/2024

   Keterangan:
   R : Drajat keamanan arsip
   000.5.3.1 : Kode klasifikasi
   001 : Nomor urut naskah dinas
   D.16 : Kode perangkat daerah
   II : Bulan nota dinas dibuat (menggunakan romawi)
   2024 : Tahun terbit

6. Penomoran Naskah Dinas Khusus sekurang-kurangnya memuat unsur nomor urut/kode perangkat daerah/bulan/tahun.
   Jenis-jenis naskah dinas khusus mengacu pada Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas.
   Contoh Penomoran Naskah Dinas Khusus:

   Nomor : 001/D.16/II/2024

   Keterangan:
   001 : Nomor urut naskah dinas dalam satu tahun takwim/kalender
   D.16 : Kode perangkat daerah
   II : Bulan nota dinas dibuat (menggunakan romawi)
   2024 : Tahun terbit.

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Dto

MARINDO KURNIAWAN